

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN POLITIK GENERASI Z DI KOTA MAKASSAR

Oleh:

A. Hendri Hendarto¹

ABSTRACT

Post-reform, political participation in Makassar City has decreased as indicated by the quality and quantity of participation. These problems encourage the need for political education carried out by Political Parties, KPUD and Bakesbangpol. The implementation of political education at the Makassar City KPU is based on Mayor Regulation No. 62 of 2012 concerning the Main Duties and Functions of Bakesbangpol which aims to educate, develop and motivate generation z to be politically literate. The method used in this research is descriptive with qualitative analysis. While the data collection technique is done through interviews, documentation and observation. This research was conducted at the KPU Makassar City. In this study, the author uses Edward III's theory of policy implementation. Political education is carried out through stages, socialization of generation z political education, socialization of political assistance, socialization of elections and through websites, social media, and banners. The attitude of the implementer still tends to be only as a task and function in carrying out. Coordination between agencies has been running, but not yet optimal. So the need for creativity implementers by collaborating with educational institutions. The implementation of political education at the KPUD is in accordance with the Mayor's Regulation 62 of 2012 concerning the main tasks and functions of the KPU listed in the program. The implementation of political education is carried out every year, involving various elements of society and generation Z. However, the political education carried out has not been able to give an effect on increasing the participation of the younger generation in Makassar City. So necessary

Keywords: *Implementation of Political Education, Political Participation and young Generation.*

ABSTRAK

Pasca reformasi, partisipasi politik di Kota Makassar mengalami penurunan diindikasikan kualitas dan kualitas partisipasi. Permasalahan tersebut mendorong perlu adanya pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Politik, KPUD dan Bakesbangpol. Pelaksanaan Pendidikan politik di KPU Kota Makassar di landasi oleh Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol yang bertujuan untuk mendidik, serta mengembangkan dan memberikan motivasi kepada generasi z agar melek politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini dilakukan di KPU Kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Edward III mengenai implementasi kebijakan. Pendidikan politik dilaksanakan dengan cara melalui tahapan-tahapan, sosialisasi pendidikan politik generasi z, sosialisasi bantuan politik, sosialisasi pemilu dan

1 Penulis adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, E-mail: hendartohendri52@gmail.com

melalui website, media sosial, dan banner-banner. Sikap pelaksana masih cenderung hanya sebagai tugas dan fungsi dalam melaksanakan. Koordinasi antar instansi sudah berjalan, namun belum optimal. Sehingga perlunya kreativitas pelaksana dengan berkolaborasi dengan instansi pendidikan. Pelaksanaan pendidikan politik di KPUD sudah sesuai dengan Peraturan walikota 62 tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi KPU yang tercantum di program. Pelaksanaan pendidikan politik dilaksanakan setiap satu tahun, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan generasi Z. Namun pendidikan politik yang dilaksanakan belum mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan partisipasi generasi muda di Kota Makassar. Sehingga perlu adanya tindak lanjut terkait pengawalan dan pengawasan generasi muda setelah sosialisasi.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Pendidikan Politik, Partisipasi Politik dan Generasi z*

PENDAHULUAN

Permasalahan politik di Indonesia sering mengalami pasang surut. Pasca reformasi, keikutsertaan warga negara dalam arena politik menampilkan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik. Dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya. Dibeberapa daerah di Indonesia masih bermasalah terkait tingginya tingkat golongan putih (*golput*) akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figur yang ditawarkan. Pelaksanaan partisipasi politik masih terancam penggunaan politik uang (*money politics*) dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Untuk menangani semua permasalahan tersebut pemerintah harus mengurangi angka golput, memberikan sanksi tegas pihak *money politics*, Sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan figur pemimpin turut meningkat.

Melihat hal tersebut perlu adanya penanganan serius dari pemerintah dalam menangani rendahnya partisipasi politik masyarakat dan generasi z. Sementara pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah melaksanakan pendidikan politik kepada generasi muda setiap tahunnya. Menurut Rusadi Kantaprawira pendidikan politik adalah sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam

sistem politiknya, sesuai faham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus menjalankan tugas partisipasi.¹

Politik sendiri tidak lepas dari partisipasi warga negara. Pelaksanaan partisipasi politik termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapkan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan.² Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang menyatakan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.³ Partisipasi politik pada dasarnya adalah kegiatan sekelompok orang untuk ikut dalam kegiatan politik.

Sementara untuk Kota Makassar sendiri dalam mewujudkan tingkat partisipasi pemuda khususnya generasi z masih terjadi kendala yaitu pemuda saat ini cenderung acuh, cuek, masa bodoh terhadap proses politik atau perkembangan politik di negara ini. Serta masih kurangnya peran pemerintah dalam politik pemuda saat ini belum diarsikan secara penuh. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya golput, faktor tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius dan harus segera ditangani terkait rendahnya partisipasi politik dan tingkat kesadaran generasi z terhadap

haknya sebagai warga negara. Generasi z saat ini cenderung aktif terlibat dalam perkembangan politik dalam negeri namun kepedulian generasi z hanya pada media-media sosial seperti facebook, twitter dan lainnya.

Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat partisipasi generasi muda hanya berada di permukaan saja, belum ada partisipasi aktif terlibat untuk ikut sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu dan lainnya. Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh KPU Kota Makassar merupakan sarana membentuk karakter kepemimpinan pada generasi z.⁴ Bila melihat potensi generasi z yang cukup besar tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan politik sangatlah penting untuk disampaikan sejak dini dan diketahui, dipahami oleh rakyat Indonesia serta generasi muda agar rakyat tidak menjadi objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik. Dengan dilaksanakannya pendidikan politik oleh KPU diharapkan generasi z menjadi "*melek politik*" agar bersinergi dalam usaha pembangunan serta partisipatif, karena rakyat akan sadar akan hak dan kewajibannya, sadar hukum, kritis, aktif dan kreatif serta konstruktif.

Berdasarkan atas permasalahan generasi z dalam hal partisipasi politik, sangat penting bagi pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan politik perlu adanya kerjasama dengan dinas terkait atau swasta dalam mensukseskan pelaksanaan program pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi z. KPU memaparkan bawasanya pendidikan politik ini dilaksanakan agar dapat memberikan pembelajaran kepada generasi z, memberikan motivasi serta pemahaman akan pentingnya peran generasi muda dalam setiap proses pemerintahan. Meskipun masih terdapat kendala dalam proses kegiatan partisipasi pendidikan politik saat ini yakni kurangnya minat masyarakat atau generasi z guna mengikuti kegiatan tersebut. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Makassar terus berusaha

mendukung kegiatan pendidikan politik berjalan guna meningkatkan partisipasi generasi z. Pendidikan politik bagi generasi muda juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.⁵

Berangkat dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul "**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN POLITIK GENERASI Z DI KOTA MAKASSAR.**"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁶ Dengan demikian penelitian deskriptif ini bertujuan memperoleh gambaran yang seutuhnya mengenai suatu hal yang menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian deskriptif ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat dan kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian ini, akan mendeskripsikan atau menjelaskan pelaksanaan pendidikan politik di KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi generasi z.

A. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk mengguna-

kan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.⁷ Ahli lain seperti halnya W.I. Jenkins berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan, beliau mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.⁸

Dari pemahaman yang dideskripsikan W.I. Jenkins diatas kita bisa menemukan bahwa suatu kebijakan publik selain mengandung unsur tujuan juga keputusan atau kebijakan yang diusulkan oleh aktor dalam hal ini memiliki ruang lingkup tertentu atau pada situasi tertentu, dan masalah tertentu. Hal ini bisa terlihat juga pada pendapat ahli lainnya yakni dari Steven A. Peterson yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan atau aksi pemerintah dalam mengatasi suatu masalah.⁹ Berangkat dari penjelasan dari beberapa ahli diatas kita bisa memahami bahwasannya kebijakan bisa dikatakan sebagai suatu arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mencapai tujuan tertentu dan mengatasi suatu permasalahan yang dilaksanakan pada ruang lingkup tertentu yang dimana didalamnya terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan. Jadi dalam hal ini pemerintah selaku yang memiliki kewenangan dituntut bisa memberikan kebijakan-kebijakan dengan tujuan yang pasti dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga nantinya memberikan dampak yang baik pada masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut George Edward III (1980) yang berpengaruh Top Down, dimana

beliau menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Ditegaskan juga olehnya bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan dari pembuat kebijakan atau kebijakannya tidak bisa berjalan sukses.¹⁰ Tidak berjalan dengan suksesnya kebijakan atau inefektifitas implementasi kebijakan publik biasanya karena kurangnya koordinasi dan kerja sama diantara lembaga-lembaga dalam pemerintahan maupun koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan melalui komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan target atau kelompok sasaran sehingga nantinya jika kelompok sasaran sudah memahami kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, efektifitas dari implementasi diperkirakan akan menjadi lebih baik. Dari penjelasan diatas kita mengetahui dan bisa menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial pada kebijakan publik yang dimana implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan yang menentukan keberhasilan dari kebijakan publik itu sendiri. Keberhasilan suatu kebijakan bisa dilihat dari berhasil tidaknya implementasi seperti yang dikatakan sebelumnya, tetapi implementasi kebijakan tidak hanya bisa dipandang dari bagaimana perumusan yang bisa dikatakan baik tetapi juga tentang bagaimana pelaksanaannya, dimana setiap jajaran yang terlibat dalam suatu kebijakan juga saling berkoordinasi agar implementasi menjadi lebih baik.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).¹¹ Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Dari penjelasan diatas, maka partisipasi politik dapat diartikan adalah keikutsertaan warga biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam pemerintahan berdasarkan kesadaran sendiri guna mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam penelitian ini yang dimaksud partisipasi politik adalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mensukseskan pendidikan politik.

4. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.¹² Pendidikan politik mensyaratkan mengandung unsur-unsur bernuansa moral. Semisal, ketaatan terhadap hukum atau aturan main, mengagungkan kepentingan publik, memproses kebijakan secara prosedural, pro rakyat banyak, penuh keteladanan, pencerahan publik, dan mengusung visi serta program yang populis. Pendidikan politik memiliki muatan politis, meliputi loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.

PEMBAHASAN

Kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam proses awal pembuatan sebuah program, kebijakan sendiri mencakup seluruh aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada

dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik. Dalam hal ini kebijakan mengenai pendidikan politik ini menekankan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik setiap individu. Selanjutnya dari pendidikan politik tersebut individu mampu memahami secara penuh dengan apa yang diterima sebelumnya. Sehingga dari proses kebijakan setiap individu mampu mengaplikasikannya pada proses selanjutnya, yaitu proses politik (Pemilu).

Pendidikan politik saat ini mempunyai tujuan pokok antara lain adalah: partisipasi politik rakyat, keterpihakan dalam konflik umum terbuka, dan keikutsertaan dalam menentukan kebijakan publik. Maka keberanian menentukan pendirian sendiri secara otonom sangat diutamakan dalam pendidikan politik, dalam pendidikan politik untuk menentukan arah perjuangan politik ditengah banyak konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Jadi secara tidak langsung pendidikan politik telah mempengaruhi individu dalam perjuangan politik guna mencapai penyelesaian konflik yang menguntungkan semua pihak.

Untuk menumbuhkan partisipasi dari setiap masyarakat maupun generasi z, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar mutlak dilakukan. Pendidikan politik dalam hal ini dipahami sebagai perbuatan untuk memberikan ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dari diri manusia. KPU Kota Makassar melaksanakan pendidikan politik melalui sosialisasi dan menghadirkan narasumber dari praktisi politik dan juga audience yaitu generasi muda. Sehingga dari penerima pesan (*generasi z*) dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan atas hak pendidikan sangat penting dalam memenuhi hak asasi manusia (HAM), seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. Hak mengenai jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti hak

menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapkan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2015.¹⁴

1. Mekanisme Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Mekanisme program pendidikan politik ialah tata cara atau teknik penanaman atau pembentukan nilai-nilai politik yang telah ada dalam dirinya. Mekanisme dalam implementai kebijakan pendidikan politik biasanya dibuat *standart operation prosedur* (SOP), SOP nantinya menjadi pedoman bagi pelaksana program dalam bertindak . Agar dalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan politik dari tujuan dan sasaran kebijakan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi z terdapat 3 mekanisme: Pertama, merupakan yang paling rendah dan lebih mudah untuk dicapai, yaitu dengan pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran politik. dalam istilah lain sering disebut *cognitif morality*. Kedua, berhubungan dengan masalah sikap (afektif). Pada tahap ini memerlukan lebih banyak usaha dan pematangan. Sedangkan tahap terakhir berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan. yang dilakukan setelah seseorang mendapatkan pendidikan politik.¹⁵

2. Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Generasi Z

Pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan KPU Kota Makassar sendiri melalui sosialisai, Sosialisasi pendidikan politik merupakan pembelajaran bagi setiap generasi z (pemilih pemula)¹⁶ dalam mengikuti kegiatan pemilukada atau sebagainya. Dari pembelajaran tersebut generasi dituntut agar nantinya masing-masing individu

memiliki kesadaran penuh dan dapat memberikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yaitu dengan ikut berpartisipasi politik dengan mengikuti pencoblosan pemilihan umum.

3. Sosialisasi Bantuan Politik

Sosialisasi banpol merupakan bagian dari Pendidikan politik oleh Partai Politik hal ini tercantum dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.¹⁷ Berdasarkan Permendagri tersebut dijelaskan bahwa bantuan parpol tersebut 60% dana dialokasikan untuk pendidikan politik, untuk kepentingan kader dan masyarakat umum, seperti untuk kepentingan seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, dan workshop. Sesuai yang sudah tercantum dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2014. Website dan Media sosial perkembangan informasi dan teknologi terus berkembang dengan seiring berjalan waktu, hal ini membuat segala informasi dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang. Perkembangan informasi dan teknologi banyak mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu sudah dapat diakses secara online oleh masyarakat. Hal ini merupakan bentuk kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Seiring perkembangan informasi dan teknologi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan terobosan yaitu dengan pemberian pendidikan politik melalui media sosial facebook, twitter dan juga instagram. Perkembangan informasi dan teknologi tentunya dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi kepada setiap orang, khususnya generasi z. Dengan tersebarnya informasi melalui media sosial tersebut, pelaksanaan pendidikan politik tidak harus mendatangkan tetapi juga dibarengi dengan penggunaan media sosial sebagai media informasi kepada generasi z. Tentunya hal tersebut sesuai dengan perkembangan jaman saat ini.

4. Sosialisasi Pemilu

Salah satu bentuk pendidikan politik yang diberikan KPU dan Politik yaitu pendidikan politik pemilu berkerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Forpimda, pengurus parpol, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas dan masyarakat. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada para peserta agar mengetahui segala tahapan yang akan dilakukan oleh KPU maupun Panwas terkait pelaksanaan Pilkada di Kota Makassar. Sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya Pemilu/Pilkada bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi hak konstitusinya sebagai warga negara.

Kerjasama antara Bakesbangpol dan KPU Kota Makassar merupakan upaya serius keduanya dalam mensukseskan Pilkada / Pemilu di Kota Makassar. Sosialisasi tersebut merupakan pemahaman bagi masyarakat serta generasi muda terkait dengan agenda-agenda politik seperti tujuan diadakannya pemilu, jadwal pelaksanaan pemilu, cara memberikan suara, pemahaman terkait suara sah dan tidak sah. Sosialisasi pemilu disini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat secara langsung, agar masyarakat mengetahui bagaimana proses pemilu yang sesungguhnya.

Konsep pertama yaitu tatap muka, kedua melalui website dan media sosial dan ketiga melalui event-event seperti pagelaran dan jalan sehat. Dari ketiga konsep yang dibuat tersebut Komisi Pemilihan Umum masih berupaya untuk bisa membuka wawasan pemikiran kepada generasi z terkait dengan pemilihan umum dan demokrasi. Kegiatan pendidikan politik pemilu tersebut dalam bentuk sosialisasi yang melibatkan berbagai masyarakat secara umum.

5. Implementasi Program Pendidikan Politik

Implementasi program pendidikan politik, Implementasi merupakan turunan dari kebijakan publik, dimana pada saat implementasi berlangsung kita dapat mengetahui secara langsung dari pelaksanaan program pendidikan politik ini. Implementasi sendiri merupakan proses menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Implementasi merupakan tahap penting dalam kebijakan, dimana pada tahap ini dapat menentukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui bakesbangpol benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Implementasi merupakan proses yang sangat penting dan vital dalam sebuah kebijakan. Karena disitu kita sudah langsung berhadapan dengan penerima kebijakan tersebut yaitu generasi muda. Generasi z saat ini memang sangat memerlukan pengetahuan akan pentingnya politik bagi kehidupan nantinya. Pendidikan politik sarana pembentukan karakter bagi generasi muda, penanaman nilai-nilai pancasila sangat penting ditanamkan sejak dini. Namun dalam prakteknya pendidikan sudah dapat kita rasakan sejak dini yaitu pada saat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang sengaja dirancang untuk sosialisasi politik.

Jadi dari implementasi pendidikan politik ini, ada tiga tujuan dari pembangunan pendidikan politik *pertama*, membentuk kepribadian politik, *kedua* kesadaran politik, *ketiga* partisipasi politik. Kepribadian politik adalah sebuah sikap individu terhadap suatu permasalahan politik yang akan menentukan tingkat kesadaran politik seseorang, hal ini dapat kita lihat melalui tingkat pendidikan atau pengetahuan individu dalam permasalahan politik sehingga dia mampu memposisikan diri dari kondisi tersebut dalam sebuah partisipasi positif. Tingkat partisipasi dan kecerdasan publik akan berkorelasi pada kualitas demokrasi dan produk-produk demokrasi seperti peraturan perundang-undangan yang baik bagi kualitas pelayanan publik.

Dari penjelasan diatas serta mengacu pada Edwards keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktornya ialah *disposision* (sikap pelaksana) yang dimana kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Akan tetapi temuan dilapangan program kegiatan yang menjadi kebijakan KPU tidak ada tidak adanya tindak lanjut dalam melaksanaan dari visi misi serta tujuan diadakannya program tersebut. Dalam hal ini pelaksana kebijakan atau implementator harus memiliki kejujuran serta komitmen yang tinggi dalam mensukseskan implementasi kebijakan. Pada pelaksanaan pendidikan politik tersebut pastinya terdapat sebuah masalah yang menyangkut kepada masing-masing individu. Bila dilihat memang faktor penentu dalam kesuksesan dalam pelaksanaan program tersebut yaitu generasi z selaku penerima kebijakan pendidikan politik.

6. Sumber Daya Program Pendidikan Politik

Sumber daya adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan secara efektif, sumber daya di sini mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup beberapa yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

a) Sumberdaya Manusia

Sumber daya disini mencakup berbagai macam, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dari pelaksanaan program pendidikan politik, dimana tanpa adanya sumber daya manusia yang cukup, ketrampilan dari masing-masing individu, profesionalitas masing-masing, dan serta kompetensi di masing-masing bidang. Sementara itu sumber daya manusia suatu hal penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan.

b) Sumberdaya Financial

Sumber daya yang tidak lain mendukung dalam kesuksesan pelaksanaan yaitu anggaran, program tanpa anggaran mustahil akan berjalan. Anggaran menjadi faktor penting ketika sebuah program akan dilaksanakan, sehingga anggaran ini dapat memudahkan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik sehingga tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan. Dengan adanya anggaran yang cukup nantinya pastinya dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik.

Sumber daya financial juga sangat menunjang kegiatan, sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain adanya sumber daya financial yang cukup, disini lain perlu adanya fasilitas yang nyaman sehingga dalam pelaksanaan generasi muda dapat berjalan lancar. Fasilitas yang cukup baik dalam pelaksanaan nantinya sangat memudahkan generasi muda memahami apa yang disampaikan pemateri. Fasilitas yang nyaman dapat memudahkan generasi muda pada saat menerima materi yang disampaikan. Sehingga materi tidak langsung hilang ketika pelaksanaan pendidikan politik selesai, materi yang disampaikan tetap terus diingat dan terekam dengan baik oleh generasi z.

7. Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dari setiap kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, baik departemen atau bidang- bidang suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi yang dilakukan bukan hanya semata-mata pada setiap kegiatan tetapi juga dalam banyak hal selalu koordinasi antar instansi. Sehingga masing-masing departemen atau bidang mampu menjalankan sesuai dengan apa yang di koordinasikan atasan.

Koordinasi dalam pendidikan politik memang melibatkan berbagai unsur dari Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik serta masyarakat. Koordinasi pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada pihak yang terkait. Dari koordinasi tersebut dapat diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak terkait yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pada interpretasi dari pelaksanaan kebijakan, baik dari kelompok sasaran (generasi z) dan juga pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan.

Konsistensi dalam memberikan informasi, sehingga nantinya tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan juga pihak terkait.

Koordinasi antara instansi terkait dalam melaksanakan pendidikan politik merupakan sebuah komponen bersama dan saling berkaitan dalam membentuk sistem dan berada dalam suatu sistem yang lebih besar. Sehingga keberhasilan pelaksanaan program tergantung pada masing-masing instansi dalam memenuhi tugas kewajiban serta tanggung jawabnya yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan diharapkan nantinya program pendidikan politik dapat serasi dengan instansi lainnya, sehingga nantinya instansi dapat memelihara kesinambungan program dengan program instansi lain dalam hal instansi-instansi yang bersangkutan memegang peranan profesional sepanjang penyelenggaraan program pendidikan politik.

Perlu adanya koordinasi lain dengan instansi lain selain Komisi Pemilihan Umum, Bakesbangpol dan Partai Politik yaitu dengan instansi Pendidikan. Instansi pendidikan merupakan penyokong dari mayoritas pemilih pemula atau generasi z, sehingga dengan adanya koordinasi yang terjalin akan memudahkan pelaksanaan pendidikan politik. diharapkan memang pendidikan politik dapat langsung terhubung dan tersampaikan kepada generasi z yang terdapat di dunia pendidikan. Institusi pendidikan tersebut dari sekolah menengah atas dan juga perguruan tinggi, bilamana koordinasi pihak terkait dengan instansi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik generasi muda yang mayoritas berada di dunia pendidikan dapat meningkat.

Persoalan-persoalan dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Pendidikan politik memang perlu dilaksanakan secara merata kepada seluruh masyarakat dan juga generasi z terutama

pemilih pemula. Namun dalam proses pelaksanaan sendiri masih terdapat persoalan-persoalan yang belum bisa diatasi secara tepat dan benar. Persoalan-persoalan yang ada tersebut tentunya menghambat proses pelaksanaan pendidikan politik dan pastinya berpengaruh terhadap tingkat partisipasi generasi z maupun masyarakat.

Kurangnya Partisipasi Generasi Muda

Partisipasi politik generasi z saat ini memang sangat kurang. Hal ini yang menyebabkan problematika di antara elite politik. Generasi z ini cenderung memilih cuek dan acuh terhadap segala perkembangan politik di Indonesia. Sehingga hal ini menyebabkan permasalahan yang perlu diatasi secara serius oleh pemerintah saat ini, dalam pelaksanaan pilkada baik dalam bentuk partisipasi sendiri peran serta generasi z juga dibidang masih kurang. Masalah yang melanda generasi z saat ini yaitu masih ada ketakutan dari masing-masing generasi z saat ini untuk bergabung atau setidaknya tidaknya ikut partai politik. Hal ini menyebabkan *mainsheet* mengenai partai atau politik buruk dimata masyarakat terutama di generasi z yang belum mengetahui secara penuh politik seperti apa. Faktor orang juga tidak dapat dipungkiri lagi, tekanan orang tua yang melarang anaknya untuk ikut politik yang lebih dalam. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa politik sendiri seperti boomerang yang patut mereka hindari. Keadaan saat ini juga memungkinkan dengan banyaknya kasus korupsi yang menyeret banyak politisi serta kepala daerah. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap figur diwarnai partai juga merosot hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat atau generasi muda dalam Pemilu.

Masalah yang melanda generasi z saat ini yaitu masih ada ketakutan dari masing-masing generasi muda saat ini untuk bergabung atau setidaknya tidaknya ikut partai

politik. Hal ini menyebabkan *mainsheet* mengenai partai atau politik buruk dimata masyarakat terutama di generasi z yang belum mengetahui secara penuh politik seperti apa. Faktor orang juga tidak dapat dipungkiri lagi, tekanan orang tua yang melarang anaknya untuk ikut politik yang lebih dalam. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa politik sendiri seperti boomerang yang patut mereka hindari. Keadaan saat ini juga memungkinkan dengan banyaknya kasus korupsi yang menyeret banyak politisi serta kepala daerah. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap figur diwarnai partai juga merosot hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat atau generasi z dalam Pemilu.

Bentuk kepedulian generasi muda saat ini hanya pada isu-isu politik dalam negeri yang sedang hangat. Partisipasi tersebut terjadi hanya di permukaan saja. Namun bila tidak dibarengi dengan pendidikan, tentunya hal ini dapat menimbulkan partisipasi yang pasif di kalangan generasi z saat ini. Sehingga memang diharapkan partisipasi generasi z tidak hanya pada isu politik yang terjadi, tetapi dapat diterapkan dalam proses politik yaitu dengan partisipasi aktif dalam Pemilu/Pilkada. Perlunya kesadaran dari masing-masing individu generasi z serta masyarakat dalam mensukseskan pemilihan umum tersebut, sehingga pada saat bergulirnya proses pemilihan yang minim partisipasi selalu menyalahkan panitia penyelenggara. Pemerintah dan institusi lain yang terlibat sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam rangka mensukseskan pemilihan umum. Sangat disayangkan apabila dana besar yang dikeluarkan dalam pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden minim partisipasi politik dari masyarakat.

Kurangnya Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyelenggara pendidikan politik juga

harus ikut mensukseskan program sehingga tercapainya target yang diharapkan. Keterlibatan pemerintah tidak hanya pembuat dan pelaksana program saja, namun pemerintah disini juga sebagai pendamping dari program pendidikan politik kepada generasi muda. Peran pemerintah sebagai penyelenggara tidak dipungkiri masih minimnya fasilitas yang diberikan pada saat pelaksanaan pendidikan politik. Faktor penunjang tersebut merupakan titik pokok yang perlu di tambahkan nanti pada saat kegiatan berlangsung.

Minimnya fasilitas yang diberikan membuat pendidikan politik sendiri dirasa kurang optimal. Hal ini menyebabkan partisipasi politik generasi z pada Pemilu masih sangat rendah, ini merupakan kegagalan pemerintah dalam memberikan pendidikan politik. Pada pelaksanaan kegiatan pemerintah hanya memberikan sosialisasi, setelah kegiatan selesai tidak adanya tindak lanjut mengenai pendidikan politik. Hal ini sangat tidak berimbang dengan materi yang diberikan, pemberian materi serta praktek memberikan gambaran secara visual mengenai pendidikan politik menjadikan nilai lebih dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda.

Belum adanya kerjasama antara instansi pemerintah dengan instansi pendidikan, hal ini menyebabkan partisipasi politik generasi masih sangat kecil. Instansi pendidikan merupakan wadah yang sangat menjanjikan, dikarenakan mayoritas pemilih pemula berada dalam instansi pendidikan baik sekolah menengah atas serta perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan masih kurangnya partisipasi generasi muda serta masyarakat dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum presiden. Perlunya adanya koordinasi dengan instansi pendidikan, penggunaan media sosial yang aktif, dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan politik yang mendukung dalam tercapainya partisipasi politik generasi muda dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data pada bab sebelumnya, Pelaksanaan Program Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi z masih terdapat berbagai kendala selama proses pelaksanaan pendidikan politik. Kurangnya peran dari pemerintah terkait pendampingan dan pengawalan pendidikan politik sehingga membuat masih minim partisipasi politik bagi kalangan generasi muda. Pelaksanaan pendidikan politik di KPU Kota Makassar masih menggunakan sosialisasi dalam melaksanakan program. Tentu hal ini merupakan cara lamban yang dilakukan pemerintah, mengenai model sosialisasi yang cenderung hanya sebagian orang yang mendapatkan informasi tentang mengenai pendidikan politik. Perlu ada keseimbangan informasi yang modern yang dimana menggunakan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat generasi muda saat ini, sehingga informasi mampu tersampaikan keseluruhan kalangan generasi muda serta masyarakat umum. Pelaksanaan program tentu didukung dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tersebut. Namun sumber daya yang ada saya rasa masih belum mampu maksimal dalam menjalankan program, dilihat dari minimnya anggota yang membidangi bidang tersebut.

Kendala program terjadi di internal maupun eksternal, baik pelaksana dan juga generasi z sebagai penerima kebijakan pendidikan politik. Program pendidikan politik oleh pemerintah belum mampu dimaksimalkan secara penuh dalam meningkatkan partisipasi generasi muda. Pemerintah melaksanakan pendidikan politik dengan sosialisasi, belum mampu membuat sebuah inovasi perubahan model sosialisasi digital (media sosial) dan turun langsung ke setiap sekolah maupun perguruan tinggi. Kendala lain terdapat di eksternal generasi z, yang belum mampu memberikan sebuah tanggung jawab

sebagai warga negara dalam memberikan suara partisipasi pemilu dan partisipasi aktif dalam organisasi. Keaktifan generasi muda saat ini cenderung mengenai isu nasional, namun partisipasi masih sangat awal. Meski demikian, tanggung jawab untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pendidikan politik harus dilaksanakan sesuai rasa nasionalis yang tinggi, hal tersebut membuat generasi muda memiliki keaktifan untuk mencari sumber informasi pendidikan politik.

Pelaksanaan pendidikan politik saat ini dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan sosialisasi yang monoton perlu ada sebuah inovasi cara baru didalam mensosialisasikan program baik penggunaan media

sosial ataupun kreativitas lainnya dan sumber daya manusia perlu adanya tambahan personil sehingga pelaksanaan dapat berjalan efektif sesuai dengan target yang diharapkan. Kendala pelaksanaan pendidikan politik baik dari pemerintah sebagai pelaksana (internal) dan generasi muda penerima kebijakan (eksternal), semua mempunyai tugas masing-masing perlu adanya koordinasi dan dukungan generasi muda dalam merespon semua yang pemerintah sudah lakukan. Disisi lain pemerintah juga harus mampu berkoordinasi, memberikan suatu perbedaan dengan sosialisasi turun langsung ke sekolah dan perguruan tinggi yang notabene mayoritas generasi z berada di dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1981. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam, 1981. *Partisipasi dan Partai Politik* (Sebuah Bunga Rampai). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2006. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Cetakan Kedua, PT. Bumi Aksara.
- Faulks, Keith. 2010. *Sosiologi Politik*. Bandung: Nusa Media. Gabriel A. Almond and Bingham Powell, *Comparative Politics A Developmental Approach* dikutip Rusadi Kantrapawira, 1999. *Budaya Politik*. GBHN, 1993. *Tentang Pendidikan*, Cetakan Kedua, Jogjakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- GBHN, 1993, *Tentang Pendidikan*, Cetakan Kedua, Jogjakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Huntington, S.P & Nelson J.M. 1997. *Partisipasi politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ihrom, Bunga Rampai, 2004, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ismail Nawawi, 2009. *Public Policy*. Surabaya: ITS Press.
- Ismail Nawawi, 2009. *Public Policy*. Surabaya: ITS Press. Kantaprawira Rusadi, 2004. *Sistem Politik Indonesia*,
- Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartini, Kartono. 2009. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Leo Agustino, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Masri Sangarimbun dan Sofyan Efendi, dalam *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1981. *Partisipasi dan Partai Politik* (Sebuah Bunga Rampai). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sholichin Abdul, Wahab S. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharsaputra, U. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama. Sugiyono, I, 2010. *Teknik-Teknik Observasi, Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.